**BAB. IV**

**P E N U T U P**

1. **K esimpulan**

Laporan Kinerja ( LK ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun berdasarkan Laporan Kinerja yang disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 sangat baik (> 100%) dengan rata – rata capaian sebesar 112,55%. Hal ini tentunya didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan baik APBD maupun APBN yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari Pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, maka hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :

* + - 1. Pengurangan Angka Pengangguran Terbuka (TPT)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Provinsi** | **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Sumatera Barat | 5.58 | 5.55 | 5.33 |

Data : BPS

Terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat sekitar 0,22% dari tahun 2018.

1. Peningkatan Angka Partisipasi (TPAK)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Provinsi** | **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %** | | **Peningkatan (%)** |
| **2018** | **2019** |
| 1 | Sumatera Barat | 67.26 | 67.51 | 0.37 |

**Membaiknya pertumbuhan ekonomi** Sumatera Barat berdampak pada **peningkatan penyerapan tenaga kerja**. Periode Agustus 2019 Sumatera Barat mencapai 2,55 juta orang atau terjadi **Kenaikan Jumlah Angkatan Kerja** sebanyak67,51 ribu ( sekitar 1.52 %) orang dibandingkan Agustus 2018 yang tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .

1. Jumlah Angkatan Kerja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Provinsi** | **Jumlah Angkatan Kerja (juta Jiwa)** | | **Peningkatan (%)** |
| **2018** | **2019** |
| 1 | Sumatera Barat | 2.552 | 2.599 | 1.84 |

Terjadi peningkatan Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 1,84% pada tahun 2019 dari tahun 2018.

1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH** | **KET** |
| 1 | Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan | 526 |  |
| 2 | Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB ) yang sudah di daftarkan | 55 |  |
| 3 | Perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama Bipartit | 111 | \*Target 570 |
| 4 | Kasus perselisihan hubungan industrial | 38 |  |

1. Peningkatan Upah Minimal Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) di tetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi melalui Keputusan Gubernur paling lambat tangal 1 November setiap tahunnya. Dengan peningkatan rata – rata 8,3% per tahun

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Upah Minimum Provinsi (UMP)** | **Dasar** |
| 2017 | 1.949.284,81 | "Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-1178-2016 Tanggal 28 Oktober 2016” |
| 2018 | 2.119.067,00 | "Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-8798-2017 Tanggal 31 Oktober 2017” |
| 2019 | 2.289.228,00 | "Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-795-2018 Tanggal 30 Oktober 2018" |
| 2020 | 2.484.041,00 | "Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-827-2019 Tanggal 29 Oktober 2019" |

1. Indek Pembangunan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mendapat penghargaan Untuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

* + - 1. Masih terbatasnya jumlah tenaga Pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan ke perusahaan.
      2. Masih belum optimalnya SDM calon pencari kerja baik untuk pelaksanaan pemagangan dalm dan luar negeri.
      3. Masih terbatasnya jumlah Instruktur yang kompeten dalam pelaksaan proses pembelajaran yang sesuai dengan permintaan pasar kerja
      4. Masih belum otimalnya dukungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penganggaran program dan kegiatan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Meningkatkan Sinkronisasi dan Sinergisitas Program /Kegiatan dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota.

Meningkatkan SDM masyarakat dan pencari kerja dalam hal ini melakukan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang sesuai dengan pasar kerja.

Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan dalam penerapan Peraturan – Perundang Undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan Tenaga kerja dalam upaya menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan

Menfasilitasi Sarana dan prasarana dikawasan Transmigrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan warga transmigran.

Meningkatkan SDM Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan melalui Bimtek dan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja.

Meningkatkan SDM Tenaga Fungsional Instruktur dan Pengantar Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Meningkatkan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Melakukan pembinaan dan Pelatihan terhadap masyarakat guna meningkatkan Tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.

Meningkatkan Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) melalui peningkatan Sarana dan prasarana yang representativ.

1. **Saran**

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk

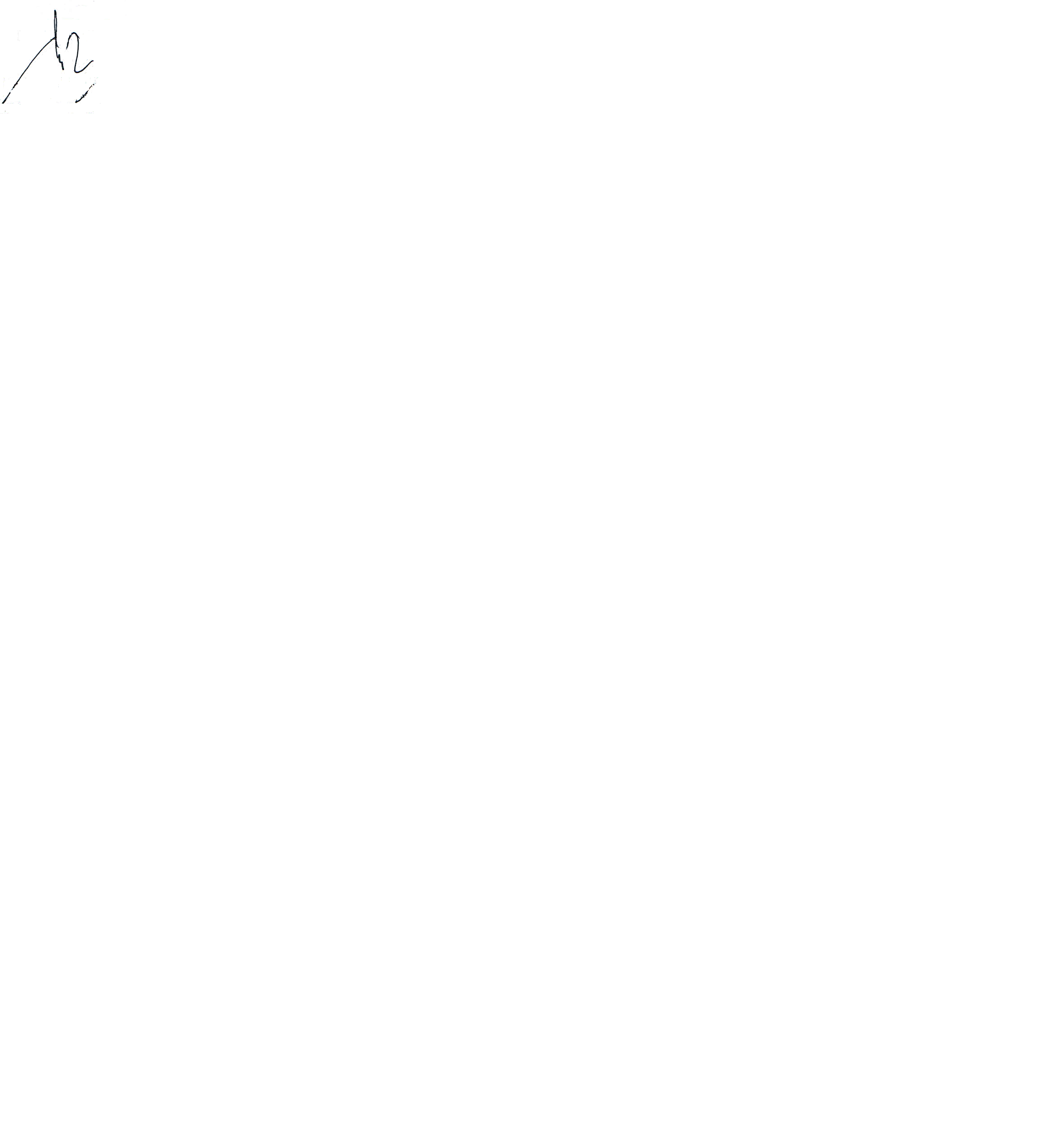
* Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
* Meningkatkan Koordinasi teknis dengan instansi terkait, perencanaan pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
* Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepadu sehingga dapat menghasilkan pekerjaan lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.

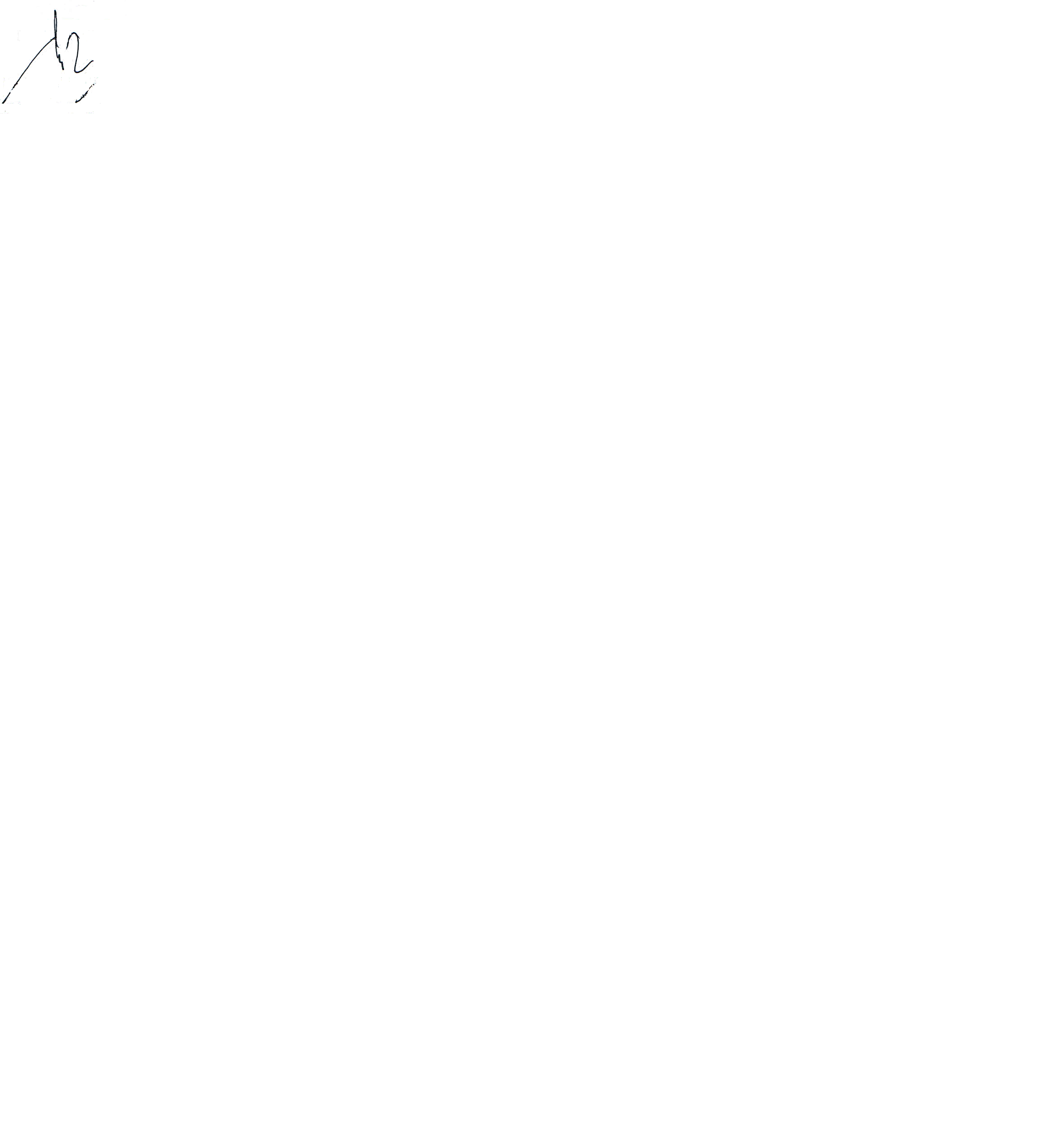
Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini kami buat sebagai bahan Pertanggungjawaban terhadap pencapaian Target Kinerja SKPD dan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang telah dicapai berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku dan semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan dating

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS**,



**NAZRIZAL, S.Sos.M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19700114 198902 1 001